



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1

tahun 2024



Disusun Oleh :

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.



Batam, 18 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Turman Hardianto Maha

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2023 sebesar **104,98**.

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 59.865.587.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.436.756.702,- atau 14,09%. Apabila disandingkan antara Nilai Kinerja Organisasi sebesar **104,98**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam	10
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.3 Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Rekomendasi	48
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2024	13
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Triwulan I Tahun 2024	16
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2024 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2024.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin;
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri; dan
 - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan

- b. Masih adanya pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dengan perizinan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

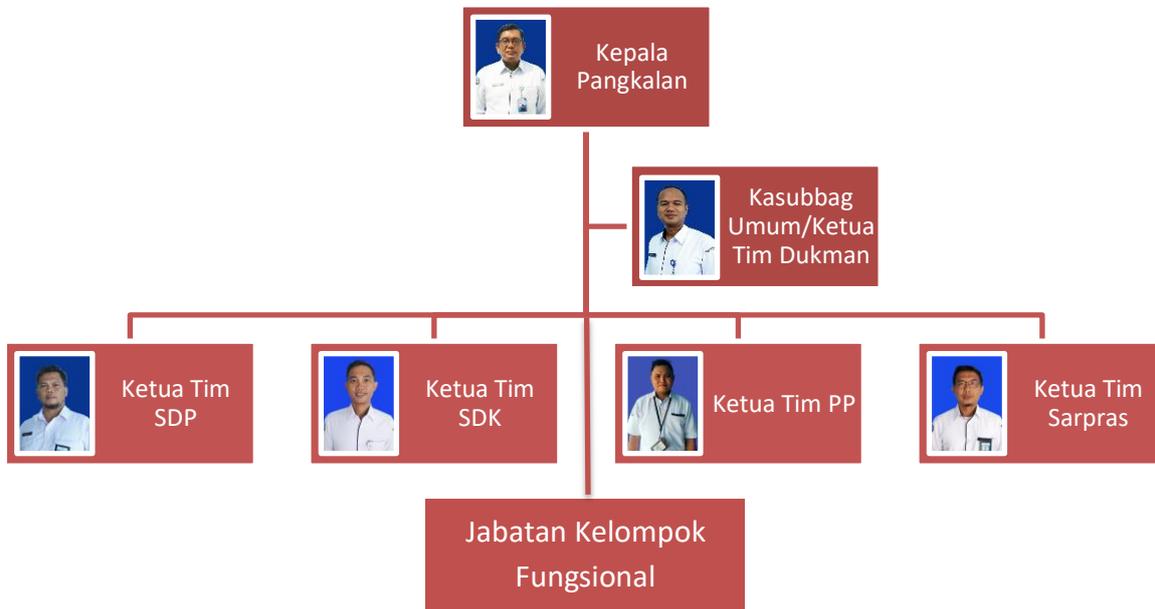
1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
 - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
 - d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
 - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
 - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
 - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya

Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 172 pegawai yang terdiri dari 88 PNS, 21 PPPK, 23 PPNPN dan 40 PJLP sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasu, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Ditjen. PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 sebesar Rp. 59.865.587.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	21
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	93,76
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	82

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2024, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 10 Sasaran Kegiatan dengan 14 IKU dan 13 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2024 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2024

NKO Maret - 2024								
Unit Kerja : PANGKALAN PSDKP BATAM								
Skor Kinerja : 104.98								
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret	%
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif							
IKS.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						108,07	
IKS.10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	88,70	110,88
IKS.10.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		
IKS.10.11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		
IKS.10.12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0,00		
IKS.10.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00		
IKS.10.14	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		
IKS.10.2	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00		
IKS.10.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung2 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00
IKS.10.4	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00		
IKS.10.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00		
IKS.10.6	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	0,00		
IKS.10.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	80,00	100,00
IKS.10.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21,00	0,00		
IKS.10.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓ 📄 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00

SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						101,78
IKS.02.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	93,55
IKS.02.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	94,10
IKS.02.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
IKS.03.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00	
IKS.03.2	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00	
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100,00
IKS.04.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan						
IKS.05.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00	
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100,00
IKS.06.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Data Dukung1 ✓ 🔗 Data Dukung2 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan						
IKS.07.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00	
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120,00
IKS.08.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	40,00	80,00
IKS.08.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	40,00	80,00
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						100,00
IKS.09.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	40,00	40,00

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2024 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2024.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan akhir Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1 (Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif)**

yaitu:

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	81	-	-	-

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 81 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2024 sebesar Rp. 300.000.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU2, IKU3 dan IKU4 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

2) Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	91	91	93,55	102,80

Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 93,55. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi sebanyak 38 hari operasi dengan jumlah kapal yang diperiksa yaitu 100 unit kapal perikanan Indonesia. Jadi rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak lebih dari 2 unit per hari operasi dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	RIKSA		
			KII	KIA	JML
1	KP. HIU MACAN 05	13	35	0	35
2	KP. HIU 03	10	13	0	13
3	KP. HIU 17	15	52	0	52
JUMLAH TOTAL		38	100	0	100

Selain itu, tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber daya perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 17.352.857.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 11.912.410.981,- atau 68,65% dari pagu.

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	91	91	94,10	103,41

Target indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 91 dan tercapai sebesar 94,10. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Tercapainya indikator ini pada tahun 2024 dikarenakan telah dilaksanakannya operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam dengan total 59 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 59 unit kapal perikanan Indonesia dan lokasi pemantauan/pengintaian terhadap kegiatan penyelundupan *baby lobster* sebanyak 6 lokasi. Dari 81 unit kapal perikanan Indonesia terdapat 1 unit kapal yang dilakukan tindak lanjut dikarenakan melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan izin. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 unit per hari operasi dan 1 lokasi pengintaian dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA SPEEDBOAT PENGAWAS	HARI OPS	RIKSA		
			KII	PENGINTAIAN	JML
1	Dolphin 008	5	10	0	10
2	Napoleon 15	5	10	0	10
3	Dolphin 18	5	7	0	7
4	Dolphin 23	5	11	0	11
5	Dolphin 15	11	22	0	22
6	Rubber Boat Sadai	0	0	0	0
7	Napoleon 16	5	4	0	4
8	Napoleon 27	6	3	0	3
9	Napoleon 35	6	10	0	10
10	RIB-X8	5	4	0	4
11	HIU BIRU 1	3	0	3	3
12	HIU BIRU 2	3	0	3	3
JUMLAH TOTAL		59	81	6	87

Jumlah hari operasi yang tinggi akan mempengaruhi cakupan wilayah pengawasan menggunakan *speedboat*. Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.856.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 298.300.000 ,- atau 16,06% dari pagu.

4) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	100	100	100	100,00

Target Presentase pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan I tahun 2024 adalah 100% dan tercapai 100%. Indikator ini mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP baik logistik untuk kapal maupun untuk personel. Terdapat beberapa indikator untuk mencapai target kegiatan ini, yaitu:

- a. Pemenuhan logistik kapal:
 - 1) Bahan bakar minyak (BBM)
 - 2) Pelumas
- b. Pemenuhan logistik Personel:
 - 1) Bahan makanan
 - 2) Air tawar
 - 3) Alat-alat pelayanan (ATK, Bahan computer, komaliwan, peta, jurnal, dll)
 - 4) Senjata api dan amunisi.

Tercapainya indikator ini dikarenakan seluruh logistik kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah terpenuhi mulai dari BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata api dan amunisi. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp.

11.553.637.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 11.285.304.769,- atau 98,59% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU5 dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)** yaitu:

5) Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-

Target persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2024 dan menjadi target tahunan. Indikator merupakan target dalam pelaksanaan fisik renovasi bangunan Satwas SDKP Palembang. Bangunan tersebut sebelumnya merupakan bangunan yang digunakan oleh Balai Riset Perikanan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP). Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 dilaksanakan serah terima bangunan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai BA nomor B.2257/PSDKP.1/PL.510/V/2022. Selanjutnya bangunan ini direncanakan akan digunakan sebagai Kantor Satwas SDKP Palembang mengingat lokasinya yang strategis. Namun, bangunan tersebut harus dilakukan renovasi terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Karena bangunan ini sudah lama tidak difungsikan oleh pengguna sebelumnya. Sampai triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan sampai tahap perencanaan. Pagu anggaran untuk renovasi bangunan kantor Satwas SDKP Palembang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.605.740,- atau 73,85%.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-

Presentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*) dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Kemudian untuk *speedboat* pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 13 unit. Pagu anggaran tahun 2024 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 7.940.580.000,- serta terealisasi anggaran 2,94% atau sebesar Rp. 233.481450,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4** (***Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan***) yaitu:

- 7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan triwulan I tahun 2024 sebesar 100 dan tercapai 100. Hal ini dikarenakan adanya penambahan personil Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Pengawasan dilakukan terhadap 2 Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil, 11 Pelaku usaha ruang laut, 1 Pelaku usaha wilayah pesisir, 5 Pelaku usaha pencemaran perairan, 2 Pelaku usaha jasa kelautan, 5 Pelaku usaha pemanfaatan wilayah konservasi, 4 Pelaku usaha ikan dilindungi dan 11 Pelaku usaha bebas kegiatan ikan yang merusak.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2024 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

- a) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlingkungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan

biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

b) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

c) Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

d) Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

e) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

f) Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking* mangrove, *dive*

center/dive operator, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

g) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan

h) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

i) Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

j) Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

k) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.811.415.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 271.685.966,- atau 9,24%.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5** (*Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan*) yaitu:

8) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU8	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	-	-	-

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan 100% menjadi target tahunan. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 131.415.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6** (*Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan*) yaitu:

- 9) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU9	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100,00

Capaian Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada triwulan I tahun 2024 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap 2 pelaku usaha kampung budidaya, 26 pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan, 14 pelaku usaha perikanan yang diawasi secara insidental dan 2 pelaku usaha yang dilakukan berbasis OSS.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO.

c) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2024 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat. Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan .

d) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

e) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

f) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Pada tahun 2024 pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dianggarkan sebesar Rp. 1.405.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp 200.018.979,- atau 13,74%.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan)** yaitu:

10) Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU10	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	100	-	-	-

Target indikator Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan 100% menjadi target tahunan. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh pengawas perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan

pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar Rp. 61.790.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU11 dan IKU12 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8 (Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas)** yaitu:

11) Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	40	80	120,00

Capaian indeks pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 100. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Pada triwulan I tahun 2024, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif pada 4 unit kapal perikanan Indonesia yaitu berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1) dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
1	KM. Anugerah Bahari Sukses	SP-1	Menangkap ikan dibawah 12 mill
2	KM. Super Rejeki	SP-1	Menangkap ikan dibawah 12 mill
3	KM. Megatama Putri	SP-1	Menangkap ikan dibawah 12 mill
4	KM. Rezeki Baru - 9	SP-1	Menangkap ikan dibawah 12 mill

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk penerapan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 575.360.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 29.039.564,- atau 5,05%.

- 12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	80	40	80	120,00

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 80. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 10 unit kapal perikanan Indonesia yang indikasi melakukan pelanggaran dari total 14 kapal perikanan Indonesia. Terhadap kapal yang lain dilakukan proses tindak lanjut pada triwulan II tahun 2024 dikarenakan sampai dengan berakhirnya triwulan I

tahun 2024 kapal masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dan belum Kembali ke Pelabuhan Pangkalan.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 untuk analisis pemantauan kapal perikanan mendapat pagu sebesar Rp 528.000.000,- dan sampai sudah terealisasi sebesar Rp. 29.039.564,- atau 5,49%.

Evaluasi dan analisis pada IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 9 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas)** yaitu:

13) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	93	40	40	100,00

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan masih kurang optimal pada triwulan I tahun 2024. Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapaiannya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 telah menangani 1 kasus TPP, namun belum Tahap II disebabkan Sprindik kasus diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 dan tahap I pada

akhir bulan Maret 2024. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 mendapat pagu sebesar Rp 458.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.606.313,- atau 11,25%.

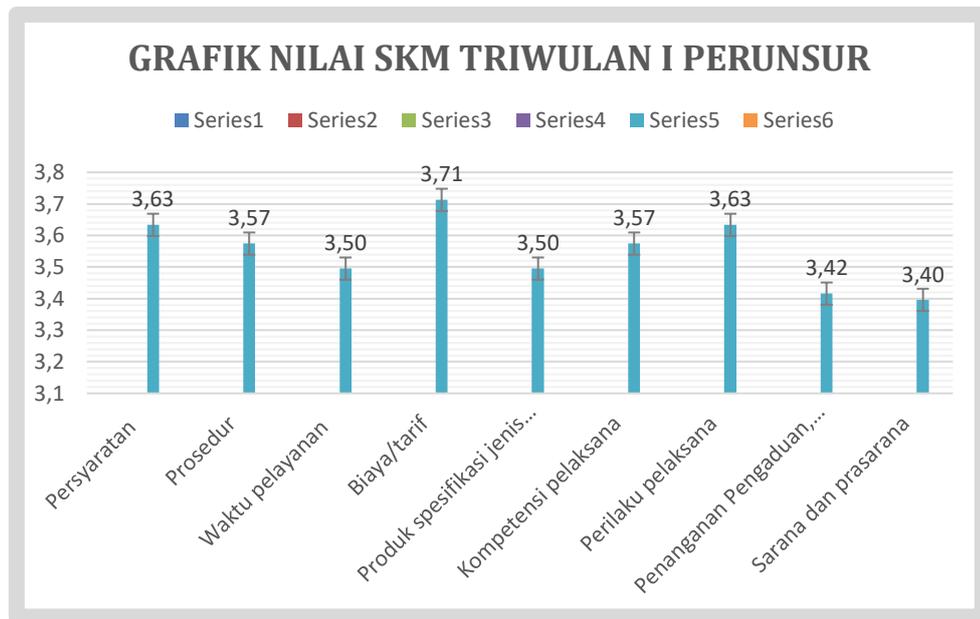
Evaluasi dan analisis pada IKU14, IKU15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22, IK23, IK24, IK25, IK26 dan IK27 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 10 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

14) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	80	88,70	110,88

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2024 adalah 88,70. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 2024 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 88,70 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal dengan rincian sebagai berikut.



Pada tahun 2024 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 152.008.000.- dan dilakukan revisi menjadi Rp. 8.054.000.-

15) Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	75	-	-	-

Target Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2024 adalah 75 dan menjadi target tahunan. Pelaksanaan WBK nantinya akan berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman

Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 53.830.000.- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 11.223.236.- atau 20,85%.

16) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100,00

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang

berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 200.624.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.018.570,- atau 95,14%.

17) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	70	-	-	-

Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 70 dan menjadi target tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan

- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 26.884.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.934.389,- atau 99,99%.

18) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2022 adalah 82 dan menjadi target semesteran. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan fungsional sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.811.856,- atau 32,65%.

19) Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	84	-	-	-

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu 84 dan menjadi target triwulanan. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 27.100.000,-.

20) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK20	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	80	100,00

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 80% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan masih belum ada temuan dan tindak lanjut dari Itjen di Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan I tahun 2024. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP

(terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk indikator ini yaitu pengelolaan keuangan sebesar Rp. 200.624.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.018.570,- atau 83,75%.

21) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	21	-	-	-

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 21 dan menjadi target tahunan. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 21.750.000,-.

22) Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	1	-	-	-

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan menjadi target tahunan. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria

inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan. Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 21.750.000,-.

23) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	94	94	133,33	120,00

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 133,33%. Semula pengukuran indikator ini menggunakan aplikasi *bitrix.24*, namun sekarang sudah diganti dengan aplikasi portal.kkp (*collaboration office/coofis*). Belum optimalnya pencapaian ini karena pegawai *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis Postingan* yang dilakukan yaitu minimal delapan kali dalam tiga bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi *coofis* (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi *coofis* (Level 3, 4 dan staf).

Optimalnya pencapaian ini karena operator *coofis* yang telah *memposting* pada halaman berita *coofis*. *Postingan* yang dilakukan yaitu minimal per triwulan sebanyak 8 berita yang mengandung 5W+1H.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp 55.950.000,- dan terealisasi Rp. 3.426.894,- atau 6,12%.

24) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	-	-	-

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu pelaksanaan pengelolaan BMN sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.544.932,- atau 71,82%.

25) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK25	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	-	-	-

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 80 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2024 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 360.000.000,-.

26) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	93,76	-	-	-

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 93,76 dan menjadi target semesteran. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2022 ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus dengan rincian sebagai berikut.

Adapun anggaran tahun 2024 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 200.624.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 168.018.570,- atau 83,75%.

27) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Triwulan I 2024		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IK27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 82 dan menjadi target tahunan. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Pada tahun 2024 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. Rp. 200.624.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 168.018.570,- atau 83,75%.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2024 terbilang efisien.

Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seluruhnya dengan penyerapan anggaran yang efisien. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan dan kelautan terutama pengawasan budidaya perikanan, kapal perikanan, pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, pengawas perikanan serta polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan

onboard pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 sebesar Rp. 59.865.587.000,- Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.436.756.702,- atau 14,09%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2024

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	32.111.761.000	3.212.869.325	10,01
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.094.000.000	80.645.877	7,37
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.941.415.000	271.685.966	9,24
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.455.790.000	200.018.979	13,74
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	22.262.621.000	4.671.536.555	20,98
TOTAL			59.865.587.000	8.436.756.702	14,09

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam triwulan I Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2024 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **104,98** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2024, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Nahkoda dan/atau Pemilik kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran dari hasil analisis SPKP Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada belum seluruhnya dilakukan permintaan keterangan	Melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan/atau Pemilik kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran SPKP

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PSDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PSDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100
SK6	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK7	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100
SK8	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK9	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK10	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	80
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	70
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	82
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	84
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	21
		22	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	94
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	80
		26	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	93,76
		27	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	32.111.761.000
2.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.094.000.000
3.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.941.415.000
4.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.455.790.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	22.262.621.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024		59.865.587.000

Jakarta, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha